

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA  
LAMU KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO**

**THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF THE  
LAMU VILLAGE GOVERNMENT, TILAMUTA DISTRICT  
BOALEMO DISTRICT**

Wirna Mayulu<sup>1)</sup>, Darman<sup>2)</sup>, Sukrianto<sup>3)</sup>

<sup>(1,2,3)</sup>Program Studi Manajemen, Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas Pemerintahan & Sektor Publik Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia.

Email<sup>(1)</sup>: [wirnamayulu06@gmail.com](mailto:wirnamayulu06@gmail.com)

Email<sup>(2)</sup>: [darman@ubmg.ac.id](mailto:darman@ubmg.ac.id)

Email<sup>(3)</sup>: [sukriyanto@ubmg.ac.id](mailto:sukriyanto@ubmg.ac.id)

**ABSTRACT**

In a period of several years from 2018 to 2022, it was found that village financial management had not been implemented optimally. The research objectives are (1) To find out the financial planning of the Lamu Village Government, Tilamuta District, Boalemo Regency. (2) To find out the financial implementation of the Lamu Village Government, Tilamuta District, Boalemo Regency. (3) To find out the financial administration of the Lamu Village Government, Tilamuta District, Boalemo Regency. (4) To find out the financial reporting of the Lamu Village Government, Tilamuta District, Boalemo Regency. (5) To find out the financial accountability of the Lamu Village Government, Tilamuta District, Boalemo Regency. The research method used is descriptive research and a qualitative approach. Data collection techniques are observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusions. The results of the research are (1) Village financial planning in Lamu Village has not been running effectively because there are still disputes over programs which have often occurred between the community and the Lamu Village Government. (2) The implementation of village finances in Lamu Village has not been running effectively because the planned programs often do not match the conditions in the field. (3) The administration of village finances in Lamu Village has been running effectively as proven by the Village Government following procedures in policies that are implemented in accordance with existing regulations. (4) Village financial reporting in Lamu Village has not been running effectively because reporting is often hampered due to networks in village financial reporting. (5) Village financial accountability in Lamu Village has been running effectively, because the Lamu Village Government will make inputs on time so as not to exceed the target time

**Keywords:** Effectiveness, Management, Finance, Village Government.

### ABSTRAK

Dalam kurun waktu beberapa tahun dari 2018 hingga 2022 memang dalam pengelolaan keuangan desa ditemui belum dilaksanakan secara maksimal. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui perencanaan keuangan Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan keuangan Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. (3) Untuk mengetahui penatausahaan keuangan Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. (4) Untuk mengetahui pelaporan keuangan Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. (5) Untuk mengetahui pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian adalah (1) Perencanaan keuangan desa pada Desa Lamu belum berjalan dengan efektif karena masih timbulnya talik ulur pada program yang selama ini sering terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Lamu. (2) Pelaksanaan keuangan desa pada Desa Lamu belum berjalan dengan efektif karena sering timbulnya program yang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. (3) Penatausahaan keuangan desa pada Desa Lamu sudah berjalan dengan efektif yang dibuktikan Pemerintah Desa melakukan sesuai prosedur pada kebijakan yang dijalankan sesuai peraturan yang ada. (4) Pelaporan keuangan desa pada Desa Lamu belum berjalan dengan efektif karena ditemukan sering terhambatnya pelaporan akibat jaringan dalam pelaporan keuangan desa. (5) Pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Lamu sudah berjalan dengan efektif, karena Pemerintah Desa Lamu akan memasukan tepat waktu agar tidak melewati waktu yang ditargetkan

**Kata kunci:** Efektifitas, Pengelolaan, Keuangan, Pemerintah Desa.

### PENDAHULUAN

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Desa merupakan bentuk kesatuan dalam masyarakat sesuai dengan landasan pada hukum sesuai batas wilayah agar dapat disesuaikan dengan wewenang sesuai dengan pengaturan dan pengurusan dalam pemerintah. Bahkan sesuai dengan kepentingan masyarakat didasarkan pada harapan masyarakat, hak, asal dan usul serta hak secara tradisional. Dimana semuanya harus dijelaskan dan memang perlu dihormati terutama dalam pelaksanaan sistem di pemerintah Indonesia. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban pada setiap desa untuk mengelola uang dan barang yang memang memiliki kaitan dengan keuangan desa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, maka adanya hak dan kewajiban agar memang berbentuk uang dan barang sesuai kebutuhan hak dan kewajiban desa yang memang perlu dikelola harus dilakukan secara efektif untuk melaksanakan pembangunan desa bisa dijalankan sesuai sasaran oleh aparat desa dan tanggungjawabnya pada desa. Dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga Desa memang harus melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan tingkat efektif baik dalam pengelolaan ADD dan DD. Maka setiap daerah pasti akan dapat menimbulkan perbedaan selama memang tidak jauh dari aturan yang memang sudah dijelaskan sebelumnya [1].

Untuk melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan dalam mengelola keuangan desa secara efektif maka sangat perlu adanya merencanakan, melaksanakan, menatausahaan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dengan akuntabel dan transparan terutama pada masyarakat desa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa organisasi dalam pemerintah harus mampu melakukan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan

agar dapat sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengevaluasian sesuai penggunaan anggaran [2]. Maka perlu adanya langkah kongkrit, agar dapat dilakukan secara luas dalam pengelolaan keuangan desa dikatakan efektif adalah memberikan pemaparan secara transparan pada masyarakat.

Sehingga seluruh masyarakat mengetahui dalam mengelola keuangan desa dilaksanakan dengan akuntabilitas dan transparan. Laporan pertanggungjawaban telah cocok dalam ketetapan yang memang secara resmi dan tercantum desa dengan baik, cepat dalam administrasi sesuai ketetapan dan kecepatan sesuai pengumpulan dokumen [3]. Efektivitas dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan menjadi langkah atau bentuk agar dapat memberikan kesadaran kepada aparat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, operator desa BPD, masyarakat dan birokrasi diatas Pemerintah Desa yaitu camat sehingga memberikan peningkatan pendapatan desa melalui transfer pada dana desa agar mampu mendukung kemajuan setiap desa.

Hasil observasi yang dilaksanakan peneliti, pada Pemerintah Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo memang menjadi perhatian dalam penelitian seperti ditemukan beberapa fenomena yang ada. Seperti diketahui problem terbesar yang ditemui adalah mengelola keuangan desa yang harus dan dapat diperhatikan masyarakat terutama di Desa Lamu. Pengelolaan keuangan desa pada Desa Lamu yang diperhatikan adalah sejauhmana dalam mengelola keuangan desa pada ADD dan DD, sejauhmana tingkat efektifitas pengelolaannya selama ini. Dalam kurun waktu beberapa tahun dari 2018 hingga 2022 memang dalam pengelolaan keuangan desa ditemui belum dilaksanakan secara maksimal.

Terutama untuk mengelola keuangan desa pada ADD dari tahun 2018-2022, masih terdapatnya sisa negosiasi harga yang akan menjadi SILPA di tahun berikutnya. Selain itu, dalam mengelola keuangan desa maka Pemerintah Desa Lamu ditemukan adanya masalah dalam mengelola DD yang sering terjadinya keterlambatan perencanaan yang mengakibatkan adanya anggaran tersisa hingga akhir tahun pada Bulan Desember. Salah satu dampak yang muncul adalah tarik ulur usulan dari masyarakat sehingga menyebabkan penetapan perubahan APBDes induk yang mengakibatkan terlambat. Kurangnya kepedulian masyarakat pasti akan memberikan dampak dalam mengelola keuangan desa secara kurang maksimal. Terutama dalam penetapan APBDes dari tahun 2017 dan 2018 sistem permintaan pembayaran (SPP) masih bersifat panjar tapi karena banyak yang sering terlambat. Bahkan di tahun 2019 dan 2020 diubah menjadi SPP definitif yang memuat pengelolaan keuangan desa tidak maksimal. Seperti diketahui selama beberapa tahun belakang membuat desa tidak mampu mendapatkan pendapatan asli desa dengan baik dari usaha BUMDes yang dijalankan. Di Desa Lamu sendiri, BUMDes saat ini kurang memberikan kontribusi yang membuat tingkat efektifitas keuangan desa dinilai kurang maksimal. Untuk itu peneliti mengangkat sebuah judul penelitian adalah Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang dapat digunakan dalam penelitian dengan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian agar dilaksanakan agar dapat mengukur variabel mandiri mandiri atau variabel yang lebih, sehingga menjelaskan perbandingan pada beberapa variabel secara mandiri dalam mencari keterkaitan dalam variabel lain [4]. Data primer adalah jenis dan sumber data yang memang didapatkan baik langsung untuk melaksanakan pengumpulan data dan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung pada informan [4] Informan untuk penelitian antara lain aparat desa dan masyarakat. Data sekunder merupakan sumber data agar dapat dilakukan secara tidak langsung dalam pemberian data melalui pengumpulan data, melalui orang lain dan dokumen [4]. Dalam penelitian dengan data yang dipakai untuk mendukung penelitian data sekunder adalah dokumen, data kuantitatif dalam laporan keuangan desa.

Teknik atau metode yang dapat digunakan dalam penelitian antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode dan teknik analisis data yang dapat dipakai dilakukan dengan mengolah data yaitu penggunaan Model Miles dan Huberman. Analisis data yang memang diperlukan dalam penelitian kualitatif sesuai dengan cara interaktif sesuai keberlangsungan dalam menyelesaikan dengan tuntas agar data yang diharapkan secara jenius [4]. Aktivitas sesuai dengan analisis data yang harus dapat dilaksanakan dengan ditunjukkan sesuai tahapan antara lain (1) reduksi data, penelitian dilaksanakan harus pada lapangan dengan mengumpulkan banyak data yang didapatkan. Sehingga dapat dilaksanakan melalui analisis data berdasarkan reduksi data. (2) Penyajian Data, Miles dan Huberman menjelaskan terkait data yang dipakai untuk penyajian data kesesuaian untuk pelaksanaan penelitian kualitatif [4]. Display data agar dapat mempermudah pemahaman yang akan terjadi. Sesuai perencanaan kerja yang didasarkan pada pemahaman. (3) Kesimpulan dan Verifikasi dalam penarikan kualitatif berdasarkan temuan

## **HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN**

### **Efektifitas Dalam Perencanaan Keuangan Desa Lamu**

Sesuai dengan tahapan perencanaan, maka Kepala Desa harus mampu menyusun rancangan dalam pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDEs) [5]. Perencanaan sesuai dengan kebutuhan keuangan pada Desa Lamu harus lebih menekankan pada analisis pada desa dalam penyusunan APBDes setiap tahun anggaran. Mengingat peran yang sangat penting dalam pengawasan serta pengendalian kegiatan baik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Lamu sangatlah memang masih rawan.

Perencanaan dalam keuangan Pemerintah Lamu sudah dilaksanakn dengan baik, tetapi belum maksimal karena akan melakukan musyawarah di tingkat dusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing dusun yang memang akan dibawah pada Musrenbang Desa nantinya. Selanjutnya dalam penetapan rencana keuangan desa akan dimasukan dalam pembahasan RKPDes yang memang melibatkan keterlibatan masyarakat. Sehingga dalam penyampaian program yang menjadi prioritas akan dibahas dalam RKPDes. Dengan adanya perencanaan keuangan desa yang sudah masuk pada tahap RKPDEs maka kesesuaian dengan

RPJMDes pada Desa Lamu akan didukung dalam penyusunan APBDes kedepannya. Tahapan semua ini memang sangat perlu adanya keterlibatan masyarakat dan memiliki peran yang begitu aktif dalam kegiatan perencanaan keuangan Desa Lamu. Artinya bahwa peran pemerintah secara langsung dalam membuka ruang pembahasan Musrenbang Desa atau RKPDes desa dengan kehadiran masyarakat sangatlah penting.

Dalam memaksimalkan perencanaan keuangan desa pada Desa Lamu dapat berjalan dengan baik. Maka tahapan yang dilaksanakan harusnya dapat dilakukan dengan koordinasi, penyampain rancangan, pembahasan, penyepakatan, sampai pada penetapan perencanaan keuangan desa menjadi peraturan desa secara regulasi telah dilakukan dan dilaksanakan Pemerintah Desa Lamu. Artinya dalam melaksanakan pembangunan desa, melalui perencanaan keuangan desa. Sangat perlu adanya peningkatan dan pemerataan proses secara jelas dalam mendukung adanya masukan dari beberapa masyarakat sehingga membuat timbulnya talik ulur antara Pemerintah Desa Lamu dengan masyarakat yang mengakibatkan kurang maksimalnya Perencanaan keuangan Desa Lamu.

Secara mendasar dalam melihat sejauhmana adanya kebutuhan dalam perencanaan keuangan Desa Lamu akan dapat disesuaikan dengan perencanaan baik dalam pendapatan desa dan belanja desa pada Pemerintah Desa Lamu berdasarkan pada tahun anggaran atau periodenya. Beberapa tahapan atau langkah pada tahapan untuk meningkatkan keterampilan meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan baik sosial dan ekonomi, meningkatkan disverifikasi pada usaha kerja yang harus termuat secara jelas berdasarkan perencanaan keuangan desa kedepannya [6].

Perencanaan dalam keuangan pada Desa Lamu menjadi poin penting sebagai tahapan dalam pelaksanaan dan mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan desa pada Desa Lamu agar dapat dirancang sesuai kebutuhan APBDes Desa. Sehingga selama ini dapat didukung dengan kebutuhan dan keberadaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa setiap tahun anggaran. Memang sangat perlu adanya kesesuaian program dengan aspirasi masyarakat dalam menguatkan dan memberikan dukungan terselenggaranya pembangunan desa yang menjadi peningkatan dan tolak ukur kesejahteraan masyarakat.

### **Efektifitas Dalam Pelaksanaan Keuangan Desa Lamu**

Untuk bagian kedua adalah pelaksanaan keuangan desa pada Desa Lamu harus mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan pada masyarakat desa di Desa Lamu. Pelaksanaan dalam pengaturan desa memang menyangkut kedudukan masyarakat dengan kebutuhan desa. Dimana dengan adanya peran penting dalam mendukung berjalannya dan terlaksananya keterbukaan sesuai dengan penyampaian informasi pada beberapa masyarakat secara jelas melalui pelaksanaan program yang didasarkan pada pendanaan dan pengelolaan keuangan pada Desa Lamu. Memang perlu adanya informasi dengan terbuka dengan adanya papan informasi yang terpampang jelas pada Kantor Desa Lamu dalam pelaksanaan yang sesuai dengan tatanan dalam bentuk baliho. Sehingga dalam hal ini tertera berdasarkan baliho yang dipajang pada depan Kantor Desa Lamu. Didalam melihat keterlibatan setiap aparat desa dalam pelaksanaan keuangan desa dengan membuat RAB dalam anggaran.

Pelaksanaan keuangan desa memang dengan tersedianya dan terbuka informasi

pengelolaan keuangan dalam melihat adanya papan informasi. Kehadiran masyarakat berpartisipasi sebagai pengawas kegiatan, sebagai bagian dalam pelaksana kegiatan dan pengarah kegiatan desa lamu. Memang masyarakat berpartisipasi sebagai pengawas kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengarah kegiatan desa lamu. Dengan penyampaian informasi keuangan desa agar keterbukaan keuangan desa lamu, kami setiap awal dan akhir tahun sudah menyiapkan yang namanya papan transparansi keuangan pada Desa Lamu. Sehingga untuk melaksanakan prinsip yang transparan dan akuntabel apalagi dalam pelaksanaan keuangan pada Desa Lamu. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat yang disampaikan baik Pemerintah Desa Lamu hingga BPD.

Tetapi kadang dalam penyampaian informasi yang terbuka agar masyarakat terutama berkaitan dengan pelaporan keuangan desa kadang didapatkan oleh masyarakat pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan tahap pada perencanaan keuangan desa sebelumnya. Sehingga Pemerintah Desa Lamu harusnya mampu memberikan informasi kegiatan desa harus terbuka dan jelas. Informasi harusnya sejalan dengan pelaksanaan dilapangan sehingga tidak menimbulkan kesan yang kurang baik dari masyarakat terkait pelaksanaan keuangan desa pada Desa Lamu selama tahun berjalan. Untuk pengelolaan pada keuangan desa sehingga dapat dilaksanakan secara baik [7]. Maka belum tentu dan masih belum adanya ketertiban mengelola administrasi untuk membuat adanya proses yang menghambat sesuai kebutuhan dalam keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan pada keuangan Desa Lamu memang perlu disesuaikan dengan adanya pelaksanaan yang sudah sesuai perencanaan dalam menyusun RKPDDes dan dianggarkan dalam APBDes. Dengan adanya pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Lamu harus disesuaikan dengan kesesuaian pada program anggaran dan pengadaan barang dan jasa pada Desa Lamu. Pemerintah Desa Lamu dapat mengelola dan memberikan pemahaman pada tugas dan fungsi pengelolaan keuangan Desa Lamu.

### **Efektifitas Dalam Penatausahaan Keuangan Desa Lamu**

Untuk proses dalam penatausahaan keuangan desa pada Desa Lamu memang masih adanya beberapa tahap salah satunya peran penting Kaur Keuangan yang masih perlu diselesaikan dengan baik dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa. Dalam melaksanakan penatausahaan proses yang harus dilakukan adalah penerimaan, penyimpanan, pembayaran pertanggungjawaban pada pengelolaan untuk mendukung pendapatan desa dan memaksimalkan belanja desa berdasarkan dan disesuaikan sehingga pelaksanaan APBDes. Proses ini menjadi penting karena dalam mendukung penatausahaan keuangan desa di Desa Lamu. Selain itu, adanya keterlibatan dari pihak lain seperti Kaur dan Kasie hingga sekretaris desa. Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa memang paling utama dalam program yang menghasilkan pendapatan desa dan digunakan dalam melaksanakan belanja desa. Untuk mendukung program di desa yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang akan diproses serta sangat diperlukan dengan LPJ keuangan desa.

Tetapi adanya dokumen lain seperti buku kas umum, buku kas umum pembantu, buku bank. Sehingga pelaksanaan didasarkan sehingga sudah dilaksanakan dan disesuaikan dengan prosedur keuangan desa yang harus dilaksanakan dengan baik dan lengkap. Bahkan dalam penatausahaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Lamu sudah mampu melaksanakan

prosedur penatausahaan keuangan desa dengan baik dan selalu disinkronisasi dalam aplikasi siskeudes. Dalam pengelolaan Dana Desa yang meningkatkan keterampilan, meningkatkan kebutuhan sosial dan ekonomi, meningkatkan disverifikasi pada usaha kerja dalam penatausahaan keuangan pada desa [6]. Dalam penatausahaan keuangan pada desa memang menjadi tanggung jawab penuh Kaur Keuangan berdasarkan dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2024. Tetapi Kaur keuangan untuk menjalankan tugas secara baik perlu adanya sistem pencatatan yang memang diperlukan adanya laporan keuangan desa yang disajikan dengan terbuka untuk dilaporkan dan diinput pada siskeudes.

### **Efektifitas Dalam Pelaporan Keuangan Desa Lamu**

Tujuan dalam pelaporan keuangan desa menjadi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Lamu dalam menggunakan dan mengelola sumber daya serta memang harus dimiliki sesuai dengan penggunaan anggaran desa baik ADD dan DD dalam peningkatan kesejahteraan desa. Manfaat pelaporan keuangan desa akan dapat mengukur dan meningkatkan pengetahuan pada meningkatkan efektivitas, efisiensi serta manfaat untuk pengelolaan keuangan desa selama 1 tahun anggaran. Memang secara jelas akan mengukur tingkat evaluasi kinerja aparat desa dalam meningkatkan pengendalian dan munculnya penyimpangan dalam mengelola keuangan pada desa. Dalam mengantisipasi laporan keuangan desa, maka Pemerintah Desa Lamu untuk pelaksanaan dan mengelola keuangan pada desa secara baik. Bentuk pelaporan keuangan desa yang dilakukan dengan adanya keterlibatan dan keikutsertaan dalam pelaporan keuangan desa yang akan dilaksanakan. Sehingga bukan hanya Kaur Keuangan yang mengambil peran penting, tetapi harus didukung dengan kehadiran dan partisipasi dari aparat desa lain, kaur umum, kaur pemerintahan hingga kasie bahkan kepala desa dan sekretaris desa.

Pelaporan keuangan di Desa Lamu memang sering terkendala dalam jaringan yang kadang kurang mendukung sehingga harusnya meliputi secara jelas baik dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena kedua program ini menjadi tolak ukur dalam melihat sejauhmana keberhasilan pelaporan keuangan desa yang dilaporkan kepada pihak tertentu. Bentuk pelaksanaan kegiatan harusnya Pemerintah Desa dapat menyajikan dalam bentuk LPJ dan SPJ yang menjadi pertanggungjawaban penting. Selain itu dukungan dokumen lain baik buku kas dan buku kas pembantu yang harus disediakan Pemerintah Desa Lamu. Untuk meningkatkan kesuksesan pelaporan keuangan desa maka perlu adanya laporan realisasi APBDes yang menjadi laporan kepada Bupati yang dilaporkan melalui Camat. Hanya saja pelaporan keuangan desa Pemerintah Desa Lamu harusnya dimulai dari tanggal 7 Januari dan penyerapan anggaran pada tanggal 7 Juli, tetapi kadang terlewatkan karena adanya talik ulur program yang direalisasikan. Sebagai bentuk pelaporan keuangan desa memang seharusnya tersaji secara jelas dalam aplikasi siskeudes sebagai bentuk pelaporan keuangan desa yang memang sangat penting yang memang menjadi implementasi Pemerintah Desa Lamu dalam penyerapan dan penggunaan anggaran di dalam 1 tahun anggaran.

### **Efektifitas Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Lamu**

Untuk pertanggungjawaban keuangan pada Desa Lamu ditemukan ada beberapa kendala salah satunya adalah pelaporan keuangan desa yang sering terhambat. Disebabkan

karena adanya talik ulur baik dalam kebijakan daerah hingga kebijakan desa yang belum sepenuhnya mendukung. Dalam laporan pertanggungjawaban diperlukan adanya pelaporan yang dilakukan secara berkala setiap bulan sehingga untuk proses dalam penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Sehingga dengan adanya peraturan berdasarkan pada laporan dan pertanggungjawaban bendahara desa untuk tiap bulan pada Kepala Desa Lamu. Dalam pelaksanaan pertanggungjawab keuangan desa di Desa Lamu harus disesuaikan dengan prinsip keuangan desa dalam bentuk transparan dan akuntabilitas. Memang secara jelas bahwa salah satunya adalah SPJ desa yang dimasukkan. Efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal [8]. Tetapi kadang adanya pengembalian laporan disebabkan karena adanya kesalahan atau masalah lain. Dalam mendukung pertanggungjawaban seharusnya setiap tahun dan adanya produk hukum yang memenuhi dan mendukung spj atau lpj yang dimasukkan. Memang kendala lain adalah kebijakan daerah dan kebijakan desa yang kadang tidak sinkronisasi dalam mendukung masyarakat di Desa Lamu. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa kadang terhambat dan menyebabkan laporan terlambat masuk. Selain itu, program pembangunan melalui infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat ditahun berikutnya akan terhambat dan kadang menyebabkan tidak terealisasi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan adalah (1) Perencanaan keuangan desa pada Desa Lamu belum berjalan dengan efektif karena masih timbulnya talik ulur pada program yang selama ini sering terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Lamu. (2) Pelaksanaan keuangan desa pada Desa Lamu belum berjalan dengan efektif karena sering timbulnya program yang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. (3) Penatausahaan keuangan desa pada Desa Lamu sudah berjalan dengan efektif yang dibuktikan Pemerintah Desa melakukan sesuai prosedur pada kebijakan yang dijalankan sesuai peraturan yang ada. (4) Pelaporan keuangan desa pada Desa Lamu belum berjalan dengan efektif karena ditemukan sering terhambatnya pelaporan akibat jaringan dalam pelaporan keuangan desa. (5) Pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Lamu sudah berjalan dengan efektif, karena Pemerintah Desa Lamu akan memasukan tepat waktu agar tidak melewati waktu yang ditargetkan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam mendukung pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kepada Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dalam mendukung penelitian dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Dinas Sosial & PMD dalam mendukung penelitian.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- [1] F. L. Sukrianto, "Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo," *MAMEN J. Manaj.*, vol. 1, no. 3, pp. 243–253, 2022, doi: <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.253>.

- [2] T. Kadjintuni, Z., Tontik, D., Darman, D., Rachman, A., & Dunggio, “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 1, 2023.
- [3] A. R. Ayuba, N. A., Darman, D., Sudarsono, S., Podungge, D., Ibrahim, E., & Abdullah, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo,” *Prof. J. Komun. dan Adm. Publik*, vol. 9, no. 2, pp. 597–602, 2022.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- [5] Dewanti, “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang,” *J. Akutansi*, vol. Fakultas E, 2015.
- [6] M. A. T. Nuning Fatimatuzzahro, Sulsalman Moita, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi di desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan,” *Welvaart J. Ilmu Kesejaht. Sos.*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [7] V. Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso,” 2019.
- [8] E. Kambey, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara,” *J. Eksek.*, vol. 1, no. 1, 2017.